

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Galih J. M. Mansnandifu, Mariolin Ance Sanggenafa, Rudiawie Larasati

galihmansnandifu@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of compensation suitability, the effectiveness of internal control and organizational culture on fraud in the Biak Numfor Regency Regional Government Agencies. The data of this study were obtained from questionnaire data (primary). The population in this study are all employees who work in the finance sub-section in each Regional Government Agency of Biak Numfor Regency. The sampling method was purposive sampling, obtained 105 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear analysis, with t-test and coefficient of determination.

The test results show that, firstly, the suitability of compensation has a significant effect on fraud. Second, the effectiveness of internal control has a significant effect on fraud. The three organizational cultures have no significant effect on fraud. The coefficient of determination is 0.309 or 30.9%, which means that the amount of compensation, the effectiveness of internal control and organizational culture against fraud is 30.9%, while the remaining 69.1% is explained by other causes originating from outside the regression that are not investigated in this study.

Keywords: *compensation suitability; effectiveness of internal control; organizational culture; and fraud*

1. PENDAHULUAN

Dari rezim Orde Lama ke Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi sekarang ini, perilaku korupsi dari “oknum-oknum” pemerintahan bukannya hilang ataupun berkurang tetapi bertambah dan merajalela. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan baik. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu, penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Kecurangan juga merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain

Pada tahun 2020 Pemerintah kabupaten Biak Numfor memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setelah 7 tahun mendapat Disclaimer, dikutip dari Papua.bpk.go.id. Selama 7 tahun terakhir pemerintah kabupaten Biak Numfor mendapat Disclaimer dari BPK RI perwakilan Provinsi Papua. Terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan dan juga terdapat berbagai tindak korupsi di pemerintah kabupaten Biak Numfor, menurut Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Biak telah menerima tiga laporan dari LSM Kampak Biak diantaranya kasus guru kontrak daerah, kasus KPU Biak, KPU Supiori serta kasus dana hibah bantuan sosial Biak dan dari tiga laporan tersebut, satu diantaranya yaitu kasus guru kontrak telah memasuki tahap 2, dikutip dari kejar Biak Numfor RRI.co.id

Penelitian Zulkarnain (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Dinas Kota Surakarta, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya

kepemimpinan, sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*, dan tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* disektor pemerintahan.

Lestari dan Supadmi (2017) melakukan penelitian di OPD Kabupaten Klungkung, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adinda (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif keefektifan pengendalian intern dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif kultur organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak komitmen atau terdapat *research gap*, sehingga memungkinkan adanya penelitian yang sama mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan penelitian ini dilakukan karena didasarkan atas beberapa penelitian diatas sebagaimana faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*), maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor tersebut di instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015), yang menguji pengaruh antara keefektifan pengendalian intern, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi di sektor pemerintahan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian intern, dan kultur organisasi.
2. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor,

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?
3. Apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ?

2. LANDASAN TEORI

Konsep *Fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey. *Fraud triangle theory* yang menjadi dasar teori utama dalam penelitian ini. Menurut teori *fraud triangle* cressey (1953) dalam Tuanakotta (2007) dalam Adinda (2015), kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu (1) Tekanan (*pressure*), (2) Peluang (*Oppurtunity*), (3) Rasionalisasi (*Rationalization*).

1. Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak *fraud* dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi. *Pressure* diproksikan dengan adanya variabel kesesuaian kompensasi.
2. Peluang (*oppurtunity*) adalah peluang terjadinya *fraud* akibat lemah atau tidaknya efektifitas kontrol sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. Faktor penyebab *fraud* yang disebabkan adanya kelemahan didalam sistem dimana seorang karyawan dapat dilakukan *Oppurtunity* diproksikan dengan adanya variabel sistem pengendalian internal.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah *fraud* terjadi karena kondisi nilai-nilai etika local yang mendorong (membolehkan) terjadinya *fraud*. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas prbadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alas an pembenaran bahwa yang dilakukan bukan pencurian atau kecurangan. Untuk memproksikan *rationalization* digunakan variabel kultur organisasi



Gambar 2.1 Fraud Triangle Theory

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Najahningrum (2013), kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Salah satu jenis Tindakan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah korupsi.

Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi setiap pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan. Menurut Wexley dan Yuki (2003:133) dalam Apriadi dan Fachriyah (2015) mengatakan bahwa suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian asset perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diberikan majikan kepada pegawainya. Dari teori ini dapat diasumsikan bahwa kompensasi yang sesuai dan memadai akan mengurangi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seperti dinyatakan dalam PSA No. 69 (IAI,2001:319.2), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

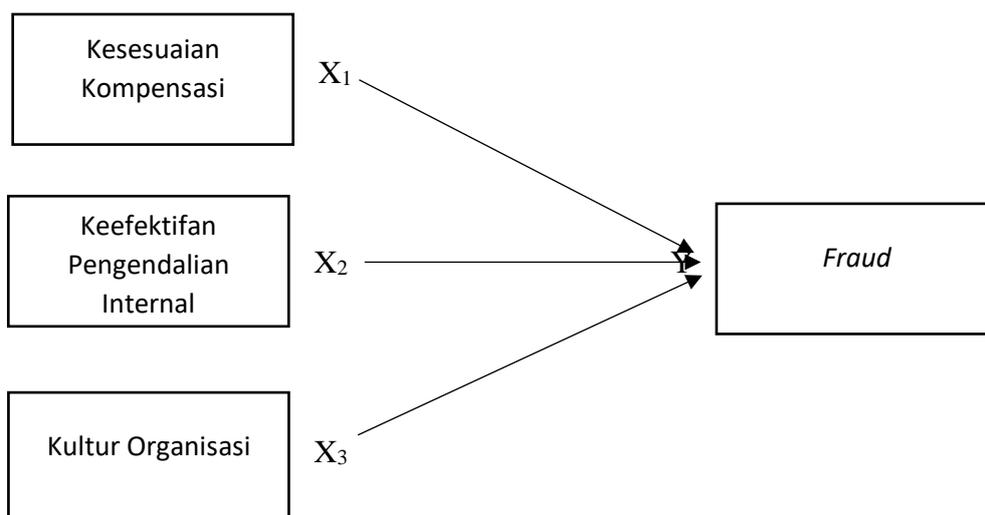
Menurut Moeljono dalam Zulkarnain (2013), kultur organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kultur organisasi merupakan nilai, norma, dan konsep dasar yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi. Peran kultur organisasi sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal (Lako, 2002).

H₁: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah.

H₂: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah.

H₃: Kultur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah.



Sumber : Peneliti 2021

Gambar 2.2 Model Pemikiran Teoritis

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di semua Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak

Numfor yaitu; 22 Dinas, 6 Badan, 1 inspektorat dan 2 sekretariat . Penelitian ini termasuk dalam metode purposive sampling, dimana penelitian ini memilih sampel dengan menggunakan metode non probabilitas (secara tidak acak).

Variabel dependen dalam variabel ini adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Variabel independent dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu: kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan kultur organisasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan angket, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden dalam bentuk Kuesioner yang telah disusun sesuai dengan judul penelitian.

Uji kualitas data bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen data yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji kualitas instrumen data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan dalam penelitian untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas menggunakan korelasi person (pearson correlation $>0,1$ dan $\text{sig}<0.05$). Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach Alpha (α). Jika nilai Cronbach (α) $>0,7$ maka instrumen yang digunakan adalah reliabel, jika sebaliknya nilai Cronbach (α) $<0,7$ maka instrumen yang digunakan tidak reliabel.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana statistik merupakan alat analisis utamanya. Alat statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple linier regression*), untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat itu. Persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Fraud = \alpha + \beta_{KK} + \beta_{KPI} + \beta_{KO} + e$$

Keterangan

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Y | = | <i>Fraud</i> di sektor pemerintahan |
| α | = | Konstanta |
| β_1 - β_3 | = | Koefisien Regresi |
| KK | = | Kesesuaian Kompensasi |
| KPI | = | Keefektifan Pengendalian Internal |
| KO | = | Kultur Organisasi |
| e | = | Kesalahan/error |

Statistik digunakan untuk menggambarkan dan meringkas hal-hal penting dari data. Hal-hal tersebut antara lain berupa nilai maksimum dan nilai minimum, standar deviasi, frekuensi, penyebaran dan pemusatan data.

Asumsi klasik bertujuan untuk menguji kalayakan model yang dibuat sebelum dilakukan model regresi. Uji Normalitas Data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar setiap variabel bebas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji t yang dikenal sebagai uji parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Apabila nilai significance level lebih besar dari nilai alpha artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak), dan sebaliknya jika nilai *significance level* lebih kecil dari nilai alpha artinya suatu variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Koefisien Determinasi pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005 dalam Sugiarto 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*adjusted R²*), karena *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*fraud*) di Instansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pengaruh variabel Kesesuaian Kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.12, dimana variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dan dengan uji-t -2,343 lebih besar dari t tabel (0,195). Dengan demikian hipotesis pertama.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Dengan demikian hal ini tidak mendukung teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kompensasi tidak mempengaruhi terjadi kecenderungan kecurangan di instansi pemerintah. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriadi dan Fachriyah (2015), Zulkarnain (2013), dan Mustikasari (2013) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Kesesuaian kompensasi pada Instansi-instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor masih tergolong dalam kategori belum sesuai dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Instansi Pemerintah. Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa besaran kompensasi yang diberikan kepada aparatur harus disesuaikan dengan prestasi kerja aparatur. Artinya pemberian kompensasi didasarkan pada kompensasi Ketika aparatur bekerja dengan baik, hal ini akan berdampak pada tingkat kepuasan dan kecukupan kompensasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap pegawai/aparatur untuk melakukan kecurangan dikarenakan alasan kebutuhan.

Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian pengaruh variabel keefektifan pengendalian internal terhadap variabel kecurangan (*fraud*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dan uji-t -3,321 yang lebih kecil dari t tabel (0,195), maka dapat diketahui bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di instansi pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriadi dan Fachriyah (2014), Zulkarnain (2013), Adinda (2015), Mustikasari (2013), serta Lestari dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung teori (*Fraud Triangle*) yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa semakin baik pengendalian internal dalam suatu instansi maka akan mengurangi peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud* di instansi

pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dan dukungan hasil penelitian terdahulu maka memberikan makna semakin efektifnya sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan di OPD pada Kabupaten Biak Numfor.

Pengaruh Kultur Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Instansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pengaruh variabel kultur organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa variabel kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.12, dimana variabel kultur organisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,369 lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dan uji -t - 0,089 yang lebih kecil dari t tabel (0,195), dengan demikian, hasil pengujian menolak hipotesis ketiga (H_3).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*. Hal ini tidak mendukung teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kultur organisasi yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi sehingga tidak melakukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke *fraud*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif kultur organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. *Fraud* dapat terjadi karena kondisi nilai-nilai etika local yang mendorong (membolehkan) terjadinya *fraud* sehingga pelaku membuat pembenaran atas kecurangan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*) di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Hal ini memiliki makna bahwa pelaksanaan roda Pemerintahan merupakan bagian dari kultur organisasi yang menunjukkan budaya organisasi yang baik. Namun demikian, adanya indikasi tingkat disiplin yang kurang dalam pelaksanaan pertemuan atau rapat-rapat mengakibatkan tidak ada fungsi kontrol dan evaluasi terhadap tugas dan tanggungjawab aparatur yang akan berdampak kepada terjadinya kecurangan di Pemerintah Daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian berdasarkan rumusan masalah pertama untuk mengetahui apakah variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap di instansi pemerintah daerah, berdasarkan hipotesis pertama yaitu kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah terbukti Diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kesesuaian kompensasi di pemerintah kabupaten Biak Numfor maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat kecurangan atau *fraud*. Oleh karena itu, instansi-instansi di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus lebih cermat lagi dalam memberikan kompensasi kepada pegawai/aparatur berupa tunjangan dan insentif agar berdampak juga terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor”.
- b. Hasil pengujian terhadap rumusan masalah kedua yaitu untuk mengetahui apakah variabel keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di instansi pemerintah daerah, berdasarkan hipotesis kedua yaitu “efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah

- daerah terbukti Diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya sistem pengendalian internal pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat kecurangan atau *fraud*. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor harus lebih mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara maksimal dan efektif agar berdampak terhadap tingkat kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor.
- c. Hasil pengujian terhadap rumusan masalah kedua untuk mengetahui apakah variabel kultur organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di instansi pemerintah daerah, berdasarkan hipotesis kultur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintah daerah terbukti Ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kultur organisasi di setiap instansi pada pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor belum mampu berpengaruh mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi. Walaupun hasil deskripsi variabel dan instrumen penelitian terkait kultur organisasi pada instansi pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor termasuk dalam kategori baik, namun tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan pertemuan (rapat) belum dilaksanakan secara maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “variabel kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap *Fraud* di instansi pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y. M. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten.
- Kusumastuti, N. R. 2012. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Apriadi, R. N dan Nurul, F. 2015. “Determinan Terjadinya *Fraud* Di Institusi Pemerintahan”
- Lailiyah, A. 2016. “Variabel-Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan: Persepsi Pegawai Bidang Keuangan di Lingkungan Pemerintahan”. *Skripsi*. Situbondo: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Lestari, N. K. L dan Ni Luh Supadmi. 2017. “Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.21.1. Oktober (2017): 389-417
- Mustikasari, D. P. 2013. “Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*)”. *Skripsi*. Batang: Universitas Negeri Semarang.
- Shiqdi, Z. A. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Instansi Pemerintahan”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.
- Zulkarnain, R. M. 2013. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Dinas Kota Surakarta”. *Accounting Analysis Journal AJJ* 2 (2) (2013).
- Najahningrum, A. F. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)”. Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.